ABSTRAK

Tesis dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Konflik Aturan Dalam Perspektif Eksekusi Jaminan Kredit Perbankan” ini terbagi menjadi 2 (dua) tujuan penelitian, yaitu : Tujuan Praktis dan Tujuan Akademis sebagaimana secara lebih terperinci diuraikan pada Bab I halaman 8 (delapan) dalam tesis ini.

Dalam penelitian ini adalah dipergunakan jenis penelitian hukum secara normative, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*), dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilaksanakan guna untuk meneliti aturan-aturan hukum di bidang perbankan pada umumnya dan di bidang hukum jaminan pada khususnya. Selanjutnya, pendekatan konsep dilaksanakan guna untuk memperoleh konsep-konsep hukum perbankan dan konsep-konsep hukum jaminan secara tepat dan menyeluruh, dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian dari tesis ini secara garis besarnya menunjukkan, bahwa : *eksekusi* terhadap obyek Hak Tanggungan dan obyek Jaminan Fidusia tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 12A Undang-undang Perbankan Jo. Pasal 1 angka 15 PBI Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, sehingga segala bentuk eksekusi yang dilaksanakan terhadap obyek Hak Tanggungan dan obyek Jaminan Fidusia yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 12A Undang-undang Perbankan Jo. Pasal 1 angka 15 PBI Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum adalah batal demi hukum. Sehingga terhadap jaminan kebendaan dalam hal Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, mengenai seluruh keberadaannya haruslah disesuaikan dengan ketentuan khusus yang mengaturnya, yaitu : Undang-undang Hak Tanggungan dan Undang-undang Jaminan Fidusia. Sehingga dalam hal akan dilakukan eksekusi terhadap obyek dari Jaminan Kebendaan sebagaai jaminan kredit, yang dalam hal ini Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, maka tata caranya harus dilakukan dengan berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan dan Undang-undang Jaminan Fidusia.

Memperhatikan essensinya sebagai jaminan kredit, maka pemegang Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Hak Tanggungan adalah tidak dapat memiliki obyek Hak Tanggungan tersebut, demikian pula yang terjadi pada pemegang Jamianan Fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-undang Jaminan Fidusia adalah tidak dapat memiliki obyek Jaminan Fidusia. Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan maupun Jaminan Fidusia diluar dari ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan dan Undang-undang Jaminan Fidusia adalah batal demi hukum.

Kata Kunci : Bank, Kredit Bermasalah, Eksekusi Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

ABSTRACT

Thesis titled "Analysis of Conflict Rules Against Judicial Executions in Perspective Banking Credit Guarantee" is divided into two (2) research objectives, namely: Practical Purpose and Objectives Academic as described in more detail in Chapter I, page 8 (eight) in this thesis.

In this research was used as a normative law research, using the approach of legislation (Statue Approach), and approach the concept (Conceptual Approach). Approach to legislation implemented in order to examine the rules of law in the field of banking in general and in the field of security law in particular. Furthermore, the approach implemented in order to obtain the concept of legal concepts of banking and legal concepts guarantees precise and thorough, with the use of primary law and secondary law.

The results of this thesis research in outline shows, that: the execution of object Mortgage and Fiduciary object can not be done under the provisions of Article 12A Banking Act Jo. Article 1 paragraph 15 PBI Commercial Bank Asset Quality Assessment, so that all forms of executions carried out against objects Mortgage and Fiduciary object which is based on the provisions of Article 12A Banking Act Jo. Article 1 paragraph 15 PBI Commercial Bank Asset Quality Rating is null and void. So as to guarantee material in terms of Hak Tanggungan and Fiduciary, on the whole existence must be adapted to the special provisions that govern them, namely: Hak Tanggungan Law and Fiduciary Law. So that in the event will be the execution of the object of the guarantee credit guarantee as a material, which in this case Hak Tanggungan and Fiduciary, then its operation should be done based and must not conflict with the provisions of Hak Tanggungan Law and Fiduciary Law

Heeding that point as a loan collateral, then the holders of Hak Tanggungan under the provisions of Article 12 of the Hak Tanggunngan Law is not able to have the Hak Tanggungan object, so it is with the holder of Fiduciary Warranty is based on the provisions of Article 33 of Law Fiduciary is not able to have an object Fiduciary. The execution of Hak Tanggungan and Fiduciary outside of the provisions of the Hak Tanggungan Law and Fiduciary Law is null and void.

Keywords : Bank, Non Performing Loan, Execution Hak Tanggungan and Fiduciary.